



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA
(PP.PPDI)**

Sekretariat : Jl. Raya Bondansari 3 Wiradesa Pekalongan Jawa Tengah
Sekretariat Nasional : Jl Penggilingan Komplek Taman Pulo Indah Paprika I No. 2 Cakung Jakarta Timur
Tlp. 082225566622 Fax 021-222948677

Website : <http://puskominfo-ppdi.or.id/> e_mail : pp.ppd2006@gmail.com

Jakarta, 24 Maret 2024

Nomor : 048/PP.PPDI/III/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Hasil
Kongres Desa**

Kepada :
Yth. 1. Ketua PPDI Provinsi
2. Delegasi Kongres Desa
dari PPDI
Se Indonesia.

di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan KONGRES DESA INDONESIA #1 tahun 2024 yang dilaksanakan di hotel Kartika Chandra Jakarta pada tanggal 22-23 Maret 2024, Bersama ini kami sampaikan beberapa hal kepada Ketua PPDI Provinsi dan seluruh delegasi PPDI se Indonesia sebagai berikut :

1. Kongres Desa Bersatu diikuti oleh 8 organisasi Desa yaitu : DPP APDESI, DPP AKSI, DPP ABPEDNAS, PP PABDESI, PP.PPDI, DPN.PPDI, DPN PARADE NUSANTARA dan DPP KOMPAKDESI
2. Organisasi Desa Bersatu berstatus sebagai wahana berhimpun 8 organisasi desa.
3. Organisasi Desa Bersatu sebagai wadah perjuangan Organisasi Desa Indonesia dalam rangka peningkatan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial.
4. Organisasi Desa Bersatu tidak menghilangkan marwah keberadaan 8 organisasi desa, salah satunya PPDI.
5. Kongres Desa Bersatu telah memilih secara musyawarah mufakat Ketua Umum Desa Bersatu periode 2024-2029 yaitu Saudara Muhammad Asri Anas.
6. Kongres Desa Bersatu menghasilkan rekomendasi sebagai berikut :
 - a. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional.
 - b. Mendesak DPR RI segera mengesahkan Revisi Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan mengakomodir usulan dari 8 organisasi desa antara lain :
 - Masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun.
 - Meperjelas status perangkat desa (PNS, P3K dan atau PNS Desa/APD.) dan kesejahteraannya.

- Meningkatkan tunjangan anggota BPD.
- c. Meminta kepada Presiden melalui Badan Otorita Ibukota Negara untuk menyiapkan lahan dalam rangka Pembangunan RUMAH DESA INDONESIA di IKN.
- d. Meminta kepada seluruh Kementerian dan Lembaga yang memiliki Program Langsung ke Desa agar berkoordinasi dengan pemerintah desa dan menggunakan tenaga atau sumber daya desa.
- e. Meminta kepada DPR dan Pemerintah agar mengadakan nomenklatur DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) bersifat afirmatif ke Desa.
- f. Meminta kepada perusahaan swasta yang menguasai mayoritas lahan perkebunan, pertanian, pertambangan serta BUMN yang memiliki lahan mayoritas di desa untuk melakukan redistribusi lahan untuk kepentingan umum masyarakat desa dan menjadi asset desa.
- g. Meminta kepada Pemerintah untuk menerbitkan tambahan jenis KUR baru yaitu KUR PEDESAAN untuk mendorong terciptanya produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, di desa desa dimana penerima KUR bisa personal dan kelompok tetapi wajib mendapatkan rekomendasi pemerintah desa.
- h. Meminta kepada Presiden dan DPR RI agar menaikkan Alokasi Dana Desa (DD) tahun 2025 minimal 5% dari APBN tahun 2025.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA

KETUA UMUM


MOH. TAHRIL, S.Pd.



SEKRETARIS JENDERAL


SOEDJOKO, S.Pd.